

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*).

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. (Ahmad Rodoni (dkk), *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Bestari Buana Murni, 2008, hal. 6-7).

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam seperti halnya bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.(Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Cet. Ke-1, 2002, h.13).

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut.(Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003,h. 85).

Keberadaan BMT, sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh para pengusaha golongan menengah ke bawah. Namun yang biasanya sangat merasakan manfaat BMT adalah para pedagang kecil. Setidaknya keberadaan BMT diharapkan menjauhkan para pedagang dari jeratan rentenir. Pedagang kecil, salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. Hal ini tidak lain karena keberadaan BMT lebih berorientasi kepada pasar bukan pada produk (Ridwan, 2004: 133-134).

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan Islam dalam operasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan bank konvensional. BMT menerapkan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya. Bagi pedagang kecil, masalah keterbatasan modal dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. Para pedagang kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan cepat serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah

dan pelaksanaan yang fleksibel. Produk-produk BMT yang disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil dan lainnya. Kredit yang diberikan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha pedagang kecil.

Hal ini yang terjadi pada KSPPS BINAMA yang didirikan pada tahun 1993, diprakarsai oleh mantan aktivis kampus dan tokoh masyarakat. Pendirian BINAMA dilandasi semangat untuk menjadi lembaga intermediasi yang akan menjadi penghubung dana idle yang dimiliki anggota namun tidak dapat memproduktifkan dananya, untuk disalurkan melalui BINAMA kepada anggota pemilik usaha pedagang kecil dan mikro yang membutuhkan modal usaha.

Sebagaimana perusahaan pada umumnya, sebagai lembaga keuangan tentu KSPPS BINAMA mengklaim bahwa laba adalah hal yang penting bagi kelangsungan lembaga. Karena penilaian baik dan buruknya perusahaan tentu tidak terlepas dari perbandingan antara pendapatan dan biaya. Jika pendapatan perusahaan lebih besar dari biayanya, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan baik, begitupun sebaliknya. Standar umum yang dipakai untuk menilai sebuah perusahaan adalah dengan menilai perolehan laba dari perusahaan, dimana laba tersebut dapat diketahui pada laporan keuangan perusahaan khususnya laporan laba rugi.

Laporan keuangan perusahaan juga mencakup laporan neraca dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini tentunya sangat diperlukan bagi para *stakeholder*. Laporan keuangan tidak akan tersaji dengan baik jika tidak didukung oleh sistem informasi akuntansi yang baik oleh lembaga keuangan. Sistem informasi akuntansi yang di terapkan oleh setiap lembaga keuangan dapat menggunakan beberapa

metode pencatatan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan. Penerapan sistem informasi akuntansi ini juga mempengaruhi transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas.

Menurut Nugroho Widjajanto (2001) bahwa “Sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.”

Setiap lembaga keuangan tidak lepas dari penggunaan kas pada kegiatannya. Kas merupakan unsur yang sangat penting bagi lembaga keuangan, karena kas sifatnya sangat mudah untuk dipindah tangankan atau bahkan manipulasi. Tanpa pengawasan yang ketat maka akan terjadi kecurangan terhadap kas.

Sistem informasi pengeluaran kas adalah suatu sistem pengolahan data akuntansi yang digunakan untuk mengelola kas, yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis untuk menghasilkan informasi akuntansi pengeluaran kas, sehingga dapat mengatur likuiditas kas-nya.

Sebagaimana dengan KSPPS BINAMA khususnya cabang Ngaliyan Semarang, tentunya penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang tersusun dengan baik sangatlah penting, hal ini berkaitan dengan produk yang diunggulkan oleh KSPPS BINAMA yaitu pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah atau jual beli.

Murabahah berdasarkan PSAK 102(paragraf 5) adalah menjual barang dengan jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Pemberian kredit pada pembiayaan modal usaha berkaitan dengan pengeluaran kas oleh KSPPS BINAMA cabang Ngaliyan Semarang. Karena itu pengeluaran kas dalam pembiayaan ini haruslah diterapkan sistem yang baik agar tidak terjadi kecurangan kelalaian. Tetapi, penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas untuk pembiayaan modal usaha sejauh pengamatan peneliti selama ini kurang berjalan dengan baik.

Pembiayaan modal usaha merupakan produk di KSPPS BINAMA cabang Ngaliyan Semarang yang sering diberikan kepada para anggotanya. Faktor banyaknya jumlah transaksi dari pembiayaan modal usaha inilah yang menjadikan lembaga kurang mempersiapkan sistem yang relevan termasuk sistem pengeluaran kasnya

Keunikan yang terjadi dalam penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pembiayaan murabahah modal usaha pada KSPPS BINAMA cabang Ngaliyan Semarang adalah dari segi tenaga pelaksananya, karena posisi *teller* terkadang dapat di kerjakan oleh *customer service* maupun administrasi, sehingga kecurangan sangat mungkin terjadi.

Adanya masalah dalam penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pembiayaan modal usaha di KSPPS BINAMA cabang Ngaliyan Semarang ini yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada pembiayaan modal usaha dalam tugas akhir dengan judul “ Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Pembiayaan Murabahah Modal Usaha di KSPPS BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang.”

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengacu pada rumusan masalah berikut ini :

- a. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Pembiayaan Murabahah Modal Usaha di KSPPS BINAMA cabang Ngaliyan Semarang
- b. Bagaimana efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Pembiayaan Murabahah Modal Usaha di KSPPS BINAMA cabang Ngaliyan Semarang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Pembiayaan Murabahah Modal Usaha di KSPPS BINAMA cabang Ngaliyan Semarang
- b. Mengetahui efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Pembiayaan Murabahah Modal Usaha di KSPPS BINAMA cabang Ngaliyan Semarang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi KSPPS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran tentang pelaksanaan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah pada KSPPS BINAMA cabang Ngaliyan Semarang terkait kendala-kendala dan solusi untuk mengatasinya, sehingga bisa menjadi bahan untuk memutuskan kebijakan tentang pembiayaan modal usaha di masa depan.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pembiayaan modal usaha dalam konsep ekonomi islam

3. Bagi Universitas

Menambah referensi di perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung dan menjadi rujukan bagi mahasiswa lain dalam menyusun tugas akhir yang terkait pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah.